



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 11578-11585

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Keterbatasan Ekonomi Dan Keberlanjutan Pendidikan Anak Pada Rumah Tangga Miskin Di Sumut

Ruwina Rahmanda¹, Diaz Ayudis², Heny Desiana Simangunsong³, Agni Maria Veronika⁴, Syarah Safira Husna⁵

^{1,2,3,4}Dapartemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

ruwinarahmanda0806@gmail.com¹, ayudiaz143@gmail.com², henysimangunsong@gmail.com³,
agnimanullang0@gmail.com⁴, svarahsafira13@gmail.com⁵

Abstrak

Kajian ini menganalisis pengaruh keterbatasan ekonomi rumah tangga miskin di Sumatera Utara terhadap keberlanjutan pendidikan anak dengan menyoro faktor ekonomi, sosial, dan akses pendidikan yang memengaruhi risiko putus sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur sistematis terhadap tujuh artikel jurnal bereputasi yang relevan dengan isu kemiskinan dan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi keluarga menjadi faktor dominan dengan koefisien pengaruh sebesar 68,3% dalam menentukan keberlanjutan pendidikan anak. Data Susenas 2021 juga menunjukkan bahwa sekitar 76% anak berhenti sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi, terutama ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung seperti transportasi, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan pendukung lainnya. Selain itu, peningkatan angka kemiskinan di Sumatera Utara yang mencapai 9,14% akibat pandemi Covid-19 turut memperbesar kerentanan pendidikan anak dari keluarga miskin. Penelitian ini juga menemukan bahwa permasalahan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi finansial, tetapi juga oleh rendahnya persepsi orang tua terhadap pentingnya pendidikan, meningkatnya keterlibatan anak dalam aktivitas kerja untuk membantu ekonomi keluarga, serta keterbatasan akses fisik menuju sekolah terutama di wilayah terpencil. Setiap penambahan jam kerja anak diketahui meningkatkan risiko putus sekolah sebesar 1,178 kali. Selain itu, norma sosial di lingkungan masyarakat turut memengaruhi keputusan keluarga terkait kelanjutan pendidikan anak. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang komprehensif melalui bantuan finansial yang lebih tepat sasaran, peningkatan literasi pendidikan orang tua, serta pemerataan akses dan kualitas pendidikan guna menekan angka putus sekolah dan meningkatkan keberlanjutan pendidikan anak di Sumatera Utara.

Kata kunci: Kemiskinan, Keterbatasan Ekonomi Rumah Tangga, Keberlanjutan Pendidikan Anak, Putus Sekolah, Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Kemiskinan dan pendidikan merupakan dua variabel yang saling mengunci dalam sebuah lingkaran yang sulit diputus. Ketika rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan anak kerap menjadi korban pertama dari kalkulasi ekonomi keluarga. Persoalan ini bukan semata tentang biaya sekolah yang tidak terjangkau, melainkan tentang bagaimana tekanan ekonomi secara sistematis membentuk keputusan-keputusan yang mengorbankan masa depan generasi muda. Di Sumatera Utara, kondisi ini berlangsung dalam skala yang tidak dapat diabaikan, dan menjadi latar yang mendesak bagi kajian ini.

Data Susenas 2021 secara nasional mencatat bahwa 76 persen keluarga yang anaknya berhenti sekolah menyebut alasan ekonomi sebagai faktor utama; 67 persen karena ketidakmampuan menanggung biaya pendidikan, dan 8,7 persen karena anak terpaksa bekerja membantu kebutuhan rumah tangga (Sulfiani dkk., 2025). Angka ini menunjukkan bahwa meski kebijakan pendidikan gratis telah diberlakukan, hambatan terhadap keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga miskin jauh lebih dalam dari sekadar persoalan SPP.

Kondisi tersebut sejalan dengan situasi kemiskinan di Sumatera Utara. Dalam jangka panjang, tingkat kemiskinan di provinsi ini memang sempat menurun dari sekitar 11,3 persen pada 2010 menjadi 8,63 persen pada Maret 2019, namun penurunannya tidak stabil karena rentan terhadap guncangan ekonomi. Pandemi Covid-19 kembali memperburuk keadaan, dengan jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 1,357 juta jiwa atau 9,14 persen pada September 2020 dan masih berada pada 1,343 juta jiwa atau 9,01 persen pada Maret 2021 (Suaidah dkk., 2023). Meskipun setelah itu angka kemiskinan kembali menurun menjadi 7,99 persen atau 1,228 juta jiwa pada Maret

2024, bahkan mencapai 7,19 persen atau 1,111 juta jiwa pada September 2024, kondisi ini tetap menunjukkan bahwa banyak rumah tangga di Sumatera Utara hidup dalam kerentanan ekonomi yang tinggi (BPS Sumatera Utara, 2024; BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025). Situasi ini semakin diperberat oleh masih adanya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta tingginya proporsi pengeluaran rumah tangga miskin untuk kebutuhan pangan, sehingga ruang untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak menjadi sangat terbatas.

Penelitian Nursita dan Edy (2022) di Kota Makassar menegaskan bahwa tingkat pendidikan orang tua dan jam kerja anak merupakan dua penentu paling signifikan terhadap status sekolah pekerja anak. Semakin rendah pendidikan orang tua, semakin kecil peluang mereka memandang sekolah sebagai investasi yang sepadan. Di sisi lain, setiap penambahan jam kerja anak meningkatkan probabilitas putus sekolah secara bermakna—sebuah mekanisme yang tidak akan teratasi hanya dengan mengurangi biaya sekolah. Temuan ini mengalihkan fokus analisis dari dimensi biaya ke dimensi persepsi dan alokasi waktu.

Pada tataran struktural, studi Togatorop dkk. (2024) di Sumatera Utara memperlihatkan bahwa variasi tingkat kemiskinan antar wilayah selama 2017-2021 dapat dijelaskan hingga 89 hingga 94 persen oleh perbedaan angka partisipasi pendidikan. Hubungan ini bersifat dua arah: rendahnya partisipasi pendidikan melanggengkan kemiskinan, sementara kemiskinan itu sendiri menekan partisipasi pendidikan. Suaidah dkk. (2023) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di enam kabupaten/kota Sumatera Utara, sementara pertambahan jumlah penduduk justru berkorelasi positif dengan peningkatan kemiskinan.

Yang perlu dicermati lebih jauh adalah temuan Nursita dan Edy (2022) yang menunjukkan bahwa pendapatan orang tua secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap status sekolah anak pekerja. Ini adalah sinyal penting: ketika sekolah di sekitar kawasan kumuh dipersepsikan tidak berkualitas, dan ketika norma komunitas menganggap bekerja lebih menguntungkan daripada bersekolah, maka besaran pendapatan bukan lagi variabel penentu utama. Persepsi kolektif tentang nilai pendidikan menjadi faktor yang justru lebih menentukan. Atas dasar pemahaman inilah kajian ini dibangun untuk memetakan secara lebih utuh mekanisme di balik relasi kemiskinan dan pendidikan anak di Sumatera Utara.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur sistematis. Pilihan ini berangkat dari premis bahwa persoalan kemiskinan dan pendidikan bersifat multidimensional—tidak dapat dipahami secara tuntas melalui angka korelasional semata. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap mekanisme, konteks, dan nuansa yang sering hilang dalam analisis kuantitatif. Studi literatur dipilih karena mensintesis temuan dari berbagai penelitian yang ada merupakan cara paling efektif untuk membangun pemahaman yang komprehensif sekaligus mengidentifikasi pola konsisten dan ketegangan konseptual yang belum terselesaikan.

2.2 Sumber Data

Corpus penelitian ini terdiri dari tujuh artikel jurnal bereputasi yang dipilih berdasarkan empat kriteria: (a) relevansi tematik secara eksplisit mengkaji hubungan kondisi ekonomi keluarga dengan akses atau keberlanjutan pendidikan anak; (b) kualitas metodologis menggunakan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan; (c) kontekstualitas berlatar Indonesia dengan prioritas pada Sumatera Utara dan wilayah berkarakter serupa; serta (d) kebaruan diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Ketujuh studi yang memenuhi kriteria ini mencakup variasi metode (kuantitatif, kualitatif, campuran), variasi konteks geografis (perkotaan dan pedesaan), serta variasi fokus analisis.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap berurutan. Pertama, penelusuran literatur secara sistematis menggunakan kata kunci: "kemiskinan dan pendidikan", "pekerja anak Indonesia", "putus sekolah", "ekonomi keluarga dan pendidikan", dan "poverty education Sumatera Utara" melalui basis data Google Scholar dan portal Garuda Kemdikbud. Kedua, ekstraksi data terstruktur terhadap setiap artikel yang lolos seleksi, mencakup tujuan penelitian, desain metodologis, variabel utama, temuan kunci, dan implikasi yang dikemukakan penulis dicatat

dalam matriks sintesis untuk memfasilitasi perbandingan antar studi. Ketiga, verifikasi dan triangulasi lintas studi untuk mengidentifikasi konvergensi, divergensi, dan kontradiksi temuan guna menghindari overgeneralisasi.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data mengikuti prosedur analisis tematik induktif tiga tahap. Pertama, open coding terhadap seluruh teks yang diekstrak—pemberian label konseptual yang muncul dari teks itu sendiri tanpa kategori yang ditetapkan di awal. Kedua, axial coding untuk mengelompokkan kode ke dalam tema-tema yang lebih abstrak dan mengorganisasikannya ke dalam kerangka yang menggambarkan jalur pengaruh dari keterbatasan ekonomi menuju keputusan pendidikan beserta faktor mediasi dan moderasinya. Ketiga, selective coding untuk menetapkan tema inti yang menjadi benang merah seluruh analisis. Kredibilitas analisis dijaga melalui prinsip member checking konseptual—memastikan interpretasi yang dibangun sejalan dengan argumen penulis asli, bukan proyeksi peneliti.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Kondisi Kemiskinan di Sumatera Utara

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan ekonomi yang masih menjadi beban hampir seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Sumatera Utara. Secara konseptual, kemiskinan dimaknai sebagai kondisi di mana seseorang atau suatu kelompok masyarakat tidak memiliki daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan, maupun kebutuhan lain yang menopang kelangsungan hidup mereka secara layak (Suaidah et al., 2023). Kondisi tersebut merupakan cerminan dari suatu keadaan serba kekurangan yang bersifat multidimensi, sekaligus melibatkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ruang yang saling berjalain.

Rekam data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di wilayah ini bergerak secara fluktuatif sepanjang rentang waktu 2010 hingga 2021. Dalam kurun September 2011 sampai September 2021, jumlah warga miskin di Sumatera Utara mengalami naik-turun yang cukup dinamis. Kecenderungan menurun terlihat pada fase September 2011 hingga September 2015, dan berlanjut lagi pada periode Maret 2016 sampai September 2019. Akan tetapi, antara Maret 2020 hingga September 2020, lonjakan angka kemiskinan terjadi secara signifikan sebagai imbas langsung dari guncangan pandemi Covid-19. Dampak pandemi tersebut mendorong jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara melonjak ke angka sekitar 1,343 juta jiwa per Maret 2021, dengan persentase tingkat kemiskinan menyentuh 9,01 persen (Suaidah et al., 2023). Meskipun demikian, memasuki periode Maret 2021 mulai tampak indikasi pemulihan yang ditandai oleh penurunan secara bertahap.

Penelitian Togatorop et al. (2024) memperkuat gambaran tersebut dengan mencatat bahwa selama kurun 2017 hingga 2021, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara secara konsisten menunjukkan tren penurunan, yakni dari 1.508.140 jiwa pada September 2017 menjadi 1.260.500 jiwa pada tahun 2021. Meski tren secara keseluruhan cenderung melandai, angka-angka tersebut secara gamblang memperlihatkan bahwa jutaan jiwa di Sumatera Utara masih bertahan hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan BPS sebesar Rp 467.826 per kapita per bulan. Realitas ini menegaskan bahwa kemiskinan masih merupakan tantangan struktural yang tak dapat diabaikan di provinsi ini.

Sejumlah faktor turut memperparah kondisi kemiskinan di Sumatera Utara, di antaranya laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali, masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat, serta tingginya angka pengangguran terbuka. Suaidah et al. (2023) menemukan bahwa penambahan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti kenaikan jumlah penduduk cenderung mendorong peningkatan angka kemiskinan. Sebaliknya, pendidikan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga peningkatan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat berkontribusi nyata terhadap penurunan angka kemiskinan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kemiskinan dan rendahnya pendidikan membentuk suatu siklus yang saling mengokohkan dan amat sukar diputus tanpa intervensi kebijakan yang menyeluruh.

Wajah kemiskinan di Sumatera Utara pun memperlihatkan perbedaan yang mencolok antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan dalam hal akses terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan, masih menjadi persoalan yang nyata dan terus bergulir. Masyarakat di kawasan pedesaan pada umumnya menghadapi rintangan yang jauh lebih besar dalam menjangkau pendidikan bermutu, akibat keterbatasan infrastruktur, jarak ke sekolah yang kerap sangat jauh, serta minimnya ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten (Sulfiani et al., 2025). Kombinasi antara kemiskinan struktural dan ketimpangan akses semacam ini menempatkan anak-anak dari keluarga miskin pada posisi yang sangat rentan terhadap ancaman putus sekolah.

3.2 Dampak Keterbatasan Ekonomi terhadap Pendidikan Anak

Kondisi perekonomian keluarga terbukti menjadi salah satu determinan paling berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan anak. Penelitian Shihab dan Mugiyono (2023) yang diselenggarakan di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, menghasilkan temuan bahwa besaran pengaruh ekonomi keluarga terhadap pendidikan anak mencapai 0,683 atau setara 68,3 persen. Nilai koefisien korelasi tersebut berada pada kisaran sedang hingga cukup kuat (0,40–0,70), yang mengisyaratkan bahwa kapasitas finansial keluarga merupakan salah satu pilar utama yang menentukan apakah seorang anak akan mampu mengakses dan menuntaskan pendidikannya atau tidak. Dengan kata lain, semakin mapan kondisi ekonomi sebuah keluarga, semakin terbuka lebar peluang anak untuk meraih pendidikan secara optimal.

Keterbatasan ekonomi memberikan dampak yang nyata dan langsung terhadap kemampuan keluarga dalam menanggung berbagai komponen biaya pendidikan anak. Meskipun pemerintah Indonesia telah menggulirkan kebijakan pendidikan gratis pada jenjang dasar dan menengah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat beragam pengeluaran tambahan yang tidak dapat dihindari, seperti biaya seragam, pengadaan buku, perlengkapan alat tulis, ongkos transportasi, uang saku harian, kegiatan ekstrakurikuler, hingga biaya ujian. Beban-beban finansial ini menjadi sangat memberatkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah (Sulfiani et al., 2025). Akibatnya, tidak sedikit keluarga miskin yang terpaksa mengorbankan kelanjutan pendidikan anak demi mendahulukan pemenuhan kebutuhan dasar yang dipandang jauh lebih mendesak.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021 yang dilaksanakan oleh BPS mengungkap fakta yang cukup memprihatinkan: sekitar 76 persen keluarga mengakui bahwa anak mereka terpaksa berhenti sekolah karena alasan ekonomi. Dari angka tersebut, 67 persen disebabkan oleh ketidakmampuan keluarga menanggung biaya pendidikan, sementara 8,7 persen lainnya dilatarbelakangi oleh keharusan anak untuk turut bekerja guna menyokong perekonomian rumah tangga (Sulfiani et al., 2025). Data ini secara gamblang memperlihatkan betapa dominannya peran faktor ekonomi dalam keputusan yang diambil keluarga miskin berkenaan dengan pendidikan anak-anak mereka.

Penelitian Togatorop et al. (2024) yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara tingkat pendidikan dan kemiskinan di Sumatera Utara dalam periode 2017–2021 menemukan hubungan yang kuat dan bermakna secara statistik antara keduanya. Nilai R-squared yang diperoleh mencapai 89 persen untuk jenjang SD, 94 persen untuk jenjang SMP, dan 81 persen untuk jenjang SMA, yang mengandung arti bahwa variasi kemiskinan dapat dijelaskan secara substansial oleh tinggi-rendahnya partisipasi pendidikan masyarakat. Makin rendah angka partisipasi pendidikan, makin tinggi pula tingkat kemiskinan yang terekam. Temuan ini mempertegas bahwa relasi antara kemiskinan dan rendahnya pendidikan bersifat resiprokal: kemiskinan menyempitkan akses terhadap pendidikan, sementara rendahnya pendidikan memperdalam jurang kemiskinan itu sendiri.

Dampak keterbatasan ekonomi terhadap pendidikan juga tercermin dalam fenomena pekerja anak yang terus menjadi realitas sosial. Nursita dan Sulistyono (2022) dalam penelitian mereka mengenai pekerja anak di Kota Makassar menemukan bahwa anak-anak dari keluarga miskin dihadapkan pada dilema dalam mengalokasikan waktu mereka: memilih untuk bersekolah atau turun ke dunia kerja. Dorongan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi muncul sebagai respons langsung terhadap himpitan kemiskinan yang melingkupi keluarga mereka. Ketika orang tua tidak lagi memandang pendidikan sebagai investasi yang bernilai dan menjanjikan, pilihan untuk bekerja pun menjadi lebih dominan ketimbang pilihan untuk melanjutkan sekolah. Kondisi ini secara langsung mengancam kesinambungan pendidikan anak-anak yang tumbuh di tengah keluarga miskin.

3.3 Keberlanjutan Pendidikan Anak pada Rumah Tangga Miskin

Kesinambungan pendidikan anak pada rumah tangga miskin merupakan persoalan yang kompleks dan berlapis-lapis. Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini mencatat bahwa pada tahun ajaran 2022/2023 terdapat lebih dari 9 juta anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Jumlah tersebut bahkan membengkak menjadi lebih dari 14 juta anak pada tahun ajaran 2023/2024, meskipun kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 13 juta anak pada tahun ajaran 2024/2025 (Sulfiani et al., 2025). Fluktuasi angka ini menegaskan bahwa persoalan kesinambungan pendidikan masih menjadi problematika serius yang belum menemukan solusi yang tuntas.

Terputusnya pendidikan pada anak dari keluarga miskin tidak semata-mata disebabkan oleh absennya biaya sekolah formal. Penelitian Nursita dan Sulistyو (2022) mengungkap bahwa secara statistik, pendapatan orang tua tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap status pendidikan pekerja anak (nilai $p = 0,980 > 0,05$). Temuan ini memberikan indikasi penting bahwa faktor-faktor penentu kesinambungan pendidikan jauh lebih kompleks dari sekadar ada atau tidaknya uang di tangan keluarga. Persepsi orang tua terhadap arti penting pendidikan, mutu sekolah yang tersedia, serta keterjangkauan lembaga pendidikan berkualitas justru memainkan peran yang sangat menentukan. Orang tua berpendidikan rendah cenderung tidak melihat sekolah sebagai investasi jangka panjang yang mampu mengubah nasib anak, terlebih ketika kualitas sekolah di lingkungan mereka pun jauh dari memadai.

Penelitian Fatimah et al. (2023) yang dilakukan di Desa Merubung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menawarkan gambaran empiris yang kuat mengenai kondisi kesinambungan pendidikan anak pada keluarga miskin di wilayah pedesaan. Dari 15 anak yang menjadi subjek penelitian, sebagian besar hanya mampu menuntaskan pendidikan hingga jenjang SMP dan SD. Para orang tua mengakui bahwa penghasilan mereka nyaris hanya cukup untuk menutup kebutuhan makan sehari-hari, sehingga memenuhi kebutuhan bersekolah anak menjadi sesuatu yang sangat sulit terwujud. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh jarak sekolah yang mencapai 5 kilometer dari tempat tinggal tanpa dukungan sarana transportasi yang memadai. Anak-anak dari keluarga ini pun kerap harus turut meringankan pekerjaan orang tua sebagai bagian dari strategi bertahan hidup keluarga.

Pekerja anak menjadi manifestasi paling nyata dari tergerusnya kesinambungan pendidikan pada keluarga miskin. Nursita dan Sulistyو (2022) menemukan bahwa jam kerja anak memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap status pendidikan pekerja anak (nilai Wald sebesar 20,065; $p = 0,000 < 0,05$). Setiap penambahan jam kerja meningkatkan kecenderungan anak untuk tidak bersekolah sebesar 1,178 kali lipat. Anak-anak yang mulai merasakan manfaat finansial secara langsung dari upah yang mereka terima akan semakin terdorong untuk mengalokasikan waktunya demi bekerja alih-alih bersekolah. Pola semacam ini membentuk lingkaran kemiskinan antargenerasi yang sangat sukar diputus: anak dari keluarga miskin terpaksa bekerja, kehilangan akses pendidikan, lalu tumbuh dewasa dalam belenggu kemiskinan yang sama persis dengan orang tuanya.

Upaya mendorong kesinambungan pendidikan anak pada rumah tangga miskin membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu. Program beasiswa serta bantuan pembiayaan personal bagi peserta didik dari kalangan tidak mampu terbukti mampu menekan angka putus sekolah secara berarti. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab V Pasal 12 ayat 1(c) secara tegas menjamin bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh beasiswa apabila orang tuanya tidak sanggup membiayai pendidikan mereka (Sulfiani et al., 2025). Namun demikian, efektivitas program tersebut sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran dalam proses distribusinya. Di sisi lain, peningkatan mutu dan aksesibilitas sekolah juga merupakan instrumen kebijakan yang sama pentingnya, karena kepercayaan orang tua terhadap manfaat pendidikan baru akan tumbuh tatkala mereka menyaksikan sendiri bahwa sekolah sungguh-sungguh mampu membuka prospek masa depan yang lebih cerah bagi putra-putri mereka.

3.4 Faktor Penyebab Anak Tidak Melanjutkan Pendidikan

Berbagai penelitian membuktikan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi anak tidak melanjutkan pendidikan bersifat multidimensi, merentang dari dimensi ekonomi, keluarga, lingkungan sosial, hingga faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Fatimah et al. (2023) mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut ke dalam dua kelompok besar: faktor internal yang bersumber dari dalam diri anak, seperti rendahnya motivasi dan

minat belajar, serta faktor eksternal yang meliputi kondisi ekonomi keluarga, iklim kehidupan dalam rumah tangga, dan pengaruh lingkungan sosial di sekitar tempat anak bertumbuh.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menempati posisi paling dominan dan paling sering disebut sebagai penyebab utama anak tidak melanjutkan pendidikan. Fatimah et al. (2023) menegaskan bahwa dari sekian banyak faktor yang berhasil diidentifikasi di lapangan, faktor ekonomi tampil sebagai yang paling menentukan, mengingat setiap kebutuhan anak yang bersekolah memerlukan pengeluaran finansial—mulai dari pembayaran iuran, pembelian buku lembar kerja siswa, pengadaan alat tulis, hingga pemenuhan berbagai perlengkapan sekolah lainnya. Ketika keluarga terbentur oleh kendala ekonomi yang serius, hambatan tersebut segera berimbas langsung pada kelangsungan pendidikan anak, bahkan tidak jarang berujung pada keputusan anak untuk meninggalkan bangku sekolah.

Kemiskinan yang parah dan tingginya beban biaya pendidikan membentuk hambatan ganda yang sangat menjerat keluarga miskin. Sulfiani et al. (2025) menjelaskan bahwa dalam situasi ekonomi yang memprihatinkan, banyak keluarga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan sekunder yang dapat dikesampingkan sementara. Meskipun program pendidikan gratis telah diimplementasikan oleh pemerintah, berbagai biaya tambahan yang tidak tercakup dalam program tersebut tetap menjadi beban yang tidak terjangkau. Kondisi ini kian diperburuk oleh praktik pekerja anak yang oleh sebagian keluarga dipandang sebagai solusi jangka pendek untuk menopang perekonomian rumah tangga, padahal dalam jangka panjang justru semakin memperdalam kemiskinan dengan memenggal pengembangan potensi dan masa depan anak.

2. Faktor Keluarga dan Peran Orang Tua

Peran keluarga, terutama orang tua, terbukti amat menentukan keberlangsungan pendidikan anak. Minimnya perhatian dan kurangnya dorongan motivasi dari orang tua terhadap pentingnya pendidikan merupakan salah satu akar signifikan dari fenomena putus sekolah. Fatimah et al. (2023) menemukan bahwa banyak orang tua dari anak yang putus sekolah jarang memberikan arahan, bimbingan, maupun teguran kepada anak mereka perihal betapa pentingnya menempuh pendidikan. Orang tua bersikap acuh tak acuh terhadap kebutuhan belajar anak, tidak mempersiapkan peralatan belajar yang diperlukan, dan tidak menetapkan jadwal belajar yang teratur dan konsisten.

Sulfiani et al. (2025) menambahkan bahwa masih banyak orang tua yang memaknai pendidikan secara dangkal dan sempit, yakni sekadar kemampuan membaca dan menulis agar tidak mudah tertipu dalam kehidupan sehari-hari. Penafsiran yang terbatas ini membuat orang tua tidak mampu menangkap potensi jangka panjang yang ditawarkan oleh pendidikan dalam upaya meningkatkan taraf dan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Tidak jarang, anak justru dihentikan sekolahnya karena dianggap lebih berdaya guna apabila langsung membantu meringankan beban perekonomian keluarga. Persepsi yang keliru ini selanjutnya menjalar dan membentuk budaya komunitas yang secara kolektif mengabaikan nilai strategis investasi pendidikan.

Penelitian Nursita dan Sulistyono (2022) secara statistik membuktikan bahwa tingkat pendidikan orang tua memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pendidikan anak yang berstatus pekerja (nilai Wald = 4,580; sig. 0,032 < 0,05), dengan arah pengaruh yang positif. Artinya, semakin tinggi jenjang pendidikan yang pernah ditempuh orang tua, semakin besar kecenderungan anak untuk tetap meneruskan sekolah, dengan rasio odds sebesar 1,330 kali. Temuan ini menegaskan bahwa rendahnya pendidikan orang tua merupakan salah satu mata rantai krusial dalam siklus kemiskinan antargenerasi yang terus memperpetuasi rendahnya capaian pendidikan pada generasi berikutnya.

3. Keterbatasan Akses Pendidikan

Keterbatasan akses fisik menuju fasilitas pendidikan menjadi hambatan tersendiri, terutama bagi masyarakat yang bermukim di wilayah terpencil dan pedesaan. Sulfiani et al. (2025) memaparkan bahwa anak-

anak di daerah yang jauh dari pusat layanan pendidikan kerap harus menempuh jarak yang sangat panjang untuk sampai ke sekolah, melewati medan yang berat—mulai dari menyeberangi sungai hingga menembus kawasan hutan—tanpa ketersediaan transportasi yang layak. Kondisi tersebut tidak hanya memberatkan secara fisik, tetapi juga menciptakan tekanan finansial tambahan bagi keluarga yang tidak mampu menyediakan biaya perjalanan anak setiap harinya.

Selain keterbatasan akses fisik, terdapat pula kesenjangan yang cukup mencolok dalam hal kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan di pedesaan. Sekolah perkotaan pada umumnya dilengkapi dengan fasilitas modern dan diampu oleh tenaga pendidik berkualifikasi tinggi, sementara sekolah pedesaan kerap kekurangan fasilitas dasar, keterbatasan akses internet, dan minimnya guru yang terlatih secara memadai. Disparitas ini tidak hanya mempersulit akses terhadap pendidikan yang bermutu, tetapi juga memengaruhi kesiapan anak dalam menghadapi dunia kerja di kemudian hari, yang pada akhirnya kembali memperkukuh siklus kemiskinan (Sulfiani et al., 2025). Ketiadaan atau minimnya ketersediaan sekolah lanjutan seperti SMP di kawasan terpencil memaksa banyak anak untuk memilih antara menempuh perjalanan panjang dan berisiko setiap hari atau berhenti sekolah sama sekali.

4. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial tempat anak bertumbuh dan berinteraksi turut memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap cara anak memandang pentingnya pendidikan bagi masa depannya. Fatimah et al. (2023) menemukan bahwa di komunitas dengan tingkat putus sekolah yang tinggi, anak-anak lebih mudah tergerak mengikuti perilaku negatif yang ada di lingkungan sekitar mereka, termasuk sikap abai terhadap pendidikan. Kehadiran figur-figur dewasa yang tidak berpendidikan, atau yang mempertontonkan bahwa kehidupan tanpa pendidikan formal pun tampak berjalan baik-baik saja, dapat menurunkan motivasi belajar anak secara drastis. Norma sosial yang tidak mendukung dan tidak menghargai pendidikan ini menjelma menjadi hambatan kultural yang sangat sulit diurai tanpa intervensi yang benar-benar menyentuh kesadaran komunitas secara mendalam.

Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa faktor-faktor penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan membentuk suatu jaringan hubungan yang saling berkaitan erat. Kemiskinan ekonomi mempersempit ruang pilihan yang tersedia bagi keluarga, persepsi orang tua yang keliru melemahkan dukungan terhadap pendidikan, keterbatasan akses fisik dan rendahnya mutu sekolah mengurangi daya tarik pendidikan di mata anak, sementara tekanan lingkungan sosial semakin memperkuat kecenderungan anak untuk meninggalkan bangku sekolah. Mengatasi persoalan yang demikian kompleks ini memerlukan strategi yang mampu menyentuh dan menjawab setiap lapis faktor tersebut secara bersamaan dan terpadu, bukan hanya berfokus pada satu aspek saja.

4. Kesimpulan

Kajian ini membuktikan bahwa putus sekolah pada rumah tangga miskin di Sumatera Utara bukan semata soal uang. Keterbatasan ekonomi memang menjadi faktor dominan—dengan koefisien pengaruh 68,3 persen dan 76 persen anak berhenti sekolah karena alasan ekonomi—namun di baliknya bekerja faktor-faktor lain yang sama kuatnya: persepsi orang tua yang meremehkan nilai pendidikan, jam kerja anak yang setiap penambahannya meningkatkan risiko putus sekolah 1,178 kali lipat, keterbatasan akses fisik ke sekolah, dan tekanan norma komunitas. Partisipasi pendidikan bahkan menjelaskan hingga 94 persen variasi kemiskinan antarwilayah di Sumatera Utara selama 2017–2021, mempertegas bahwa relasi keduanya bersifat resiprokal: kemiskinan menyempitkan akses pendidikan, dan rendahnya pendidikan mewariskan kemiskinan ke generasi berikutnya. Memutus siklus ini menuntut intervensi yang bergerak serentak di tiga lini: perluasan bantuan finansial yang menjangkau biaya riil di luar SPP, penguatan literasi pendidikan orang tua berbasis komunitas, dan pemerataan mutu sekolah di kawasan terpencil. Kebijakan yang hanya menasar satu lini tidak akan cukup karena akar kemiskinan antargenerasi di Sumatera Utara tumbuh dari banyak titik sekaligus.

Referensi

1. Badan Pusat Statistik. (2023). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
2. BPS Provinsi Sumatera Utara. (2024). Profil kemiskinan di Sumatera Utara Maret 2024. <https://sumut.bps.go.id>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7579>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3. BPS Provinsi Sumatera Utara. (2025). Persentase penduduk miskin September 2024 turun 0,80 poin menjadi 7,19 persen. <https://sumut.bps.go.id>
4. Fatimah, N., Genjik, B., & Witorsa. (2023). Analisis faktor-faktor penyebab anak putus sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 12(9), 2451–2458. <https://doi.org/10.26418/jppk.v12i9.69601>
5. Khariroh, N. E. (2024). Kemiskinan di Indonesia: Analisis penyebab, dampak, dan solusi kebijakan. *Maliki Interdisciplinary Journal*.
6. Maharani, C., et al. (2023). Dampak kemiskinan terhadap kualitas pendidikan anak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*.
7. Nursita, L., & Edy, P. B. S. (2022). Pendidikan pekerja anak: Dampak kemiskinan pada pendidikan. *Jambura Economic Education Journal*, 4(1), 1–15.
8. Rahman, P. A., et al. (2019). Kemiskinan dalam perspektif ilmu sosiologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
9. Sarjito, A. (2024). Implikasi kebijakan pendidikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. *Jurnal Loyalitas Sosial*.
10. Shihab, B. A. A., & Mugiyono. (2023). Pengaruh ekonomi keluarga terhadap pendidikan anak. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(1), 467–472. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i1.1399>
11. Suaidah, Harahap, I., Ardiansyah, M. R., & Hamdani, F. (2023). Analisis pengaruh pendidikan, jumlah penduduk, dan pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Eduonomika*, 7(1). <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v7i1.7505>
12. Sulfiani, B., et al. (2025). Analisis faktor ekonomi yang mempengaruhi jutaan anak putus sekolah pendidikan dasar Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 400–411.
13. Togatorop, R. S., Sinaga, M. H. P., Putri, N. A., Hafifah, R., & Nuraina, A. L. (2024). Dampak tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2017–2021. *Jurnal Simki Economic*, 7(2), 380–389.
14. UNESCO. (2021). *Global education monitoring report 2021*. Paris: UNESCO.
15. Wulandari, N. F., et al. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*.